EFEKTIVITAS DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Syafarianur Firda
NPP. 33.0819
Program Studi Keuangan Publik
Email: syafanurfirda15@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari, SE., MM
Email: Ekobudilestari@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *Balikpapan City faces a unique fiscal anomaly: despite not being a direct mining producer, it receives Mineral and Coal Revenue Sharing Fund (DBH Minerba) dominating an average of 64.32% of total DBH, increasing from IDR 116.5 billion (2022) to IDR 278.4 billion (2024). A projected 45.11% cut in Regional Transfers in the 2026 national budget threatens fiscal stability given the city's 67–74% dependence on central transfers.* ***Purpose:*** *This study analyzes the effectiveness of Minerba DBH in increasing regional income in Balikpapan City.* ***Method:*** *A Descriptive Qualitative approach was employed through in-depth interviews with 22 TAPD officials, observation, and document review (CALK, KUA-PPAS). Effectiveness was evaluated using Mardiasmo's (2021) Value for Money (VFM) framework—economy, efficiency, effectiveness, accountability, and transparency—benchmarked against MoF Regulation No. 97/2025.* ***Result:*** *Minerba DBH proved effective through an indirect multiplier effect: port infrastructure investment drove PAD beyond IDR 1.06 trillion (2024), regional retribution surged 309.84%, and hotel and restaurant taxes grew above 50%. Balikpapan was placed in the High Regional Fiscal Capacity category (PMK 97/2025, score 0.256). Three structural obstacles identified: commodity price volatility, cash disbursement time-lag, and procurement delays.* ***Conclusion:*** *Minerba DBH effectiveness must be supported by adaptive fiscal strategies and PAD diversification to withstand the risk of central transfer cuts.*

Keywords: *Balikpapan City; Effectiveness; Fiscal Capacity; Mineral and Coal; Revenue Sharing Fund.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kota Balikpapan menghadapi anomali fiskal yang unik: meskipun bukan daerah penghasil tambang, kota ini menerima DBH Mineral dan Batubara (Minerba) yang mendominasi rata-rata 64,32% dari total DBH, meningkat dari Rp116,5 miliar (2022) menjadi Rp278,4 miliar (2024). Proyeksi pemotongan Transfer ke Daerah sebesar 45,11% pada APBN 2026 mengancam stabilitas fiskal yang bergantung pada transfer pusat sebesar 67–74% dari total pendapatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas DBH Minerba dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Balikpapan. **Metode:** Pendekatan Kualitatif Deskriptif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan 22 informan TAPD, observasi, serta telaah dokumen CALK dan KUA-PPAS. Evaluasi menggunakan kerangka Value for Money (VFM) Mardiasmo (2021) dengan lima dimensi: ekonomi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, berpedoman pada PMK Nomor 97 Tahun 2025 sebagai tolak ukur formal. **Hasil/Temuan:** DBH Minerba terbukti efektif melalui indirect multiplier effect: investasi infrastruktur Pelabuhan Kariangau mendorong PAD melampaui Rp1,06 triliun (2024), retribusi daerah melonjak 309,84%, pajak hotel dan restoran tumbuh di atas 50%. Kota Balikpapan ditempatkan pada Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kategori Tinggi (skor 0,256) sesuai PMK 97/2025. Tiga hambatan struktural teridentifikasi: volatilitas harga komoditas dan perubahan formula DBH, time-lag penyaluran kas, serta kelambatan pengadaan. **Kesimpulan:** Efektivitas DBH Minerba perlu ditopang strategi fiskal adaptif dan diversifikasi PAD guna menghadapi risiko pemotongan transfer pusat pada TA 2026.

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil; Efektivitas; Kapasitas Fiskal; Kota Balikpapan; Minerba.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diwujudkan melalui desentralisasi fiskal, yakni pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Christia & Ispriyarso, 2020). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang memberikan ruang fiskal lebih luas bagi daerah melalui berbagai sumber pendapatan termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) (Hermawadi dkk., 2024).

Kota Balikpapan menghadapi anomali fiskal yang unik. Meskipun bukan daerah produsen aktif tambang batubara, kota ini secara konsisten menerima alokasi DBH

Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Minerba) dalam jumlah signifikan karena posisinya sebagai daerah pengolah (kilang) dan pintu gerbang logistik di Provinsi Kalimantan Timur. DBH Minerba mendominasi rata-rata 64,32% dari total DBH, meningkat dari Rp116,5 miliar (2022) menjadi Rp278,4 miliar (2024) (Malini, 2021). Di sisi lain, struktur pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat sebesar 67–74% dari total pendapatan, sehingga proyeksi pemotongan TKD sebesar 45,11% pada APBN 2026 menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas fiskal daerah (Arief, 2025).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan DBH secara umum, namun masih terbatas penelitian yang mengkaji efektivitas DBH Minerba secara spesifik pada daerah yang berstatus bukan penghasil langsung namun menerima alokasi besar. Teguh & Ichsan (2019) menyimpulkan bahwa kajian DBH selama ini lebih berfokus pada daerah penghasil, sehingga mekanisme indirect multiplier effect pada daerah logistik seperti Balikpapan belum terpotret secara empiris. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis tidak hanya besaran penerimaan, tetapi juga kualitas pengelolaan dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan mengingat proyeksi pemotongan transfer pusat sebesar 45,11% pada TA 2026 berpotensi mengguncang fondasi fiskal Kota Balikpapan, setara hilangnya Rp1,29 triliun dari kas daerah. Evaluasi empiris terhadap efektivitas DBH Minerba melalui kerangka Value for Money diperlukan sebagai dasar perumusan strategi adaptif fiskal yang berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah kota akan kekurangan bukti empiris yang kuat dalam mengambil kebijakan diversifikasi pendapatan yang tepat sasaran, sehingga upaya penguatan kemandirian fiskal berisiko tidak optimal dalam menghadapi krisis transfer pusat yang akan segera datang.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa kajian terdahulu. Teguh & Ichsan (2019) menyimpulkan DBH SDA berkontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah penghasil, namun daerah non-penghasil cenderung memiliki ketergantungan transfer tinggi. Hermawadi dkk. (2024) menemukan efektivitas pengelolaan DBH sangat dipengaruhi kapasitas perencanaan anggaran daerah. Christia dan Ispriyarso (2020)

mengkaji desentralisasi fiskal dan menunjukkan ketidakstabilan transfer pusat menghambat perencanaan belanja modal daerah. Adipura dkk. (2022) membuktikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Arief (2025) mengidentifikasi tantangan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat sebagai isu struktural yang perlu diatasi melalui diversifikasi PAD. Cheryll dkk. (2025) menambahkan bahwa analisis rasio kemandirian keuangan daerah merupakan instrumen penilaian kinerja fiskal yang krusial bagi pemerintah daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dari tiga sisi. Pertama, dari segi objek penelitian: mengkaji kota non-penghasil tambang yang justru menerima DBH Minerba dominan melalui mekanisme pemerataan provinsi—belum dikaji penelitian sebelumnya. Kedua, dari segi kerangka evaluasi: mengombinasikan VFM lima dimensi Mardiasmo (2021) dengan PMK 97/2025 sebagai tolak ukur formal kapasitas fiskal. Ketiga, dari segi konteks kebijakan: mengevaluasi efektivitas di tengah ancaman pemotongan TKD 45,11% pada APBN 2026. Kombinasi ketiga elemen ini belum pernah dikaji secara terintegrasi dalam penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Minerba) dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Balikpapan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Balikpapan selama periode Januari–April 2026. Pendekatan ini dipilih karena peneliti membutuhkan pemahaman mendalam tentang proses dan dinamika pengelolaan DBH Minerba yang tidak dapat diperoleh melalui data numerik semata (Creswell, 2016).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam dengan 22 informan dari TAPD yang terdiri dari pejabat BKAD, BPPRD, BAPPEDA, dan Humas Pemkot Balikpapan—informan kunci adalah Kepala BKAD Kota Balikpapan karena kapasitas dan kewenangannya yang paling komprehensif terkait pengelolaan DBH; (2)

observasi langsung terhadap proses pengelolaan anggaran; dan (3) telaah dokumen meliputi CALK, KUA-PPAS, dan regulasi terkait.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (TAPD, BAPPEDA, BPPRD) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian narasi tematik, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Evaluasi efektivitas menggunakan kerangka Value for Money (VFM) Mardiasmo (2021) dengan lima dimensi: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi. PMK Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan sebagai tolak ukur formal penilaian capaian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas DBH Minerba dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan

Evaluasi efektivitas DBH Minerba dilakukan menggunakan kerangka VFM lima dimensi. Hasil penelitian membuktikan pengelolaan DBH Minerba di Kota Balikpapan terbukti sangat efektif melalui mekanisme indirect multiplier effect (efek pengganda tidak langsung).

Pada dimensi Ekonomi, pemerintah kota menerapkan target penerimaan konservatif berdasarkan proyeksi harga batubara global, sehingga terhindar dari defisit anggaran akibat fluktuasi harga komoditas. Tren penerimaan DBH Minerba meningkat signifikan dari Rp116,5 miliar (2022) menjadi Rp278,4 miliar (2024), berkontribusi dominan sebesar rata-rata 64,32% dari total DBH.

Pada dimensi Efisiensi, pemerintah melakukan earmarking sebesar Rp4,2 miliar untuk pembangunan fisik RS Balikpapan Timur dan mengoptimalkan Pelabuhan Kariangau sebagai pusat logistik tambang regional. Rasio Belanja Modal mencapai 28%, membuktikan dana transfer pusat berhasil diubah menjadi aset jangka panjang yang produktif.

Pada dimensi Efektivitas, investasi infrastruktur pelabuhan memicu lonjakan aktivitas ekonomi lokal. PAD Kota Balikpapan melampaui Rp1,06 triliun pada tahun 2024. Retribusi Daerah melonjak 309,84%, Pajak Jasa Perhotelan tumbuh di atas 50% mencapai Rp71,7 miliar, dan Pajak Makanan/Minuman menembus Rp167,8 miliar. Capaian ini dikonfirmasi oleh PMK 97/2025 yang menempatkan Kota Balikpapan pada

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kategori Tinggi (skor 0,256), mematahkan asumsi Flypaper Effect.

Pada dimensi Akuntabilitas, seluruh pengelolaan DBH Minerba diverifikasi melalui sistem e-SPD dan secara konsisten mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Tim Asistensi internal dibentuk untuk memastikan pelaporan keuangan tepat waktu agar terhindar dari penalti transfer.

Pada dimensi Transparansi, seluruh dokumen KUA-PPAS, hasil Musrenbang, dan laporan keuangan dipublikasikan melalui portal resmi PPID Kota Balikpapan (ppid.balikpapan.go.id). Pemkot secara proaktif mengekspose proyeksi pemotongan TKD sebesar 45,11% pada APBN 2026 setara hilangnya Rp1,29 triliun, sebagai bentuk transparansi fiskal yang patut diapresiasi.

3.2. Hambatan dalam Pengelolaan DBH Minerba

Tiga hambatan struktural utama teridentifikasi. Pertama, volatilitas harga batubara global dan perubahan formula pembagian royalti dari Kementerian Keuangan yang tidak dapat diprediksi, membuat proyeksi penerimaan kas daerah rentan meleset dari target KUA-PPAS. Posisi Kota Balikpapan sebagai daerah penerima pasif tanpa wewenang intervensi atas lifting tambang memperparah kerentanan ini (Teguh & Ichsan, 2019).

Kedua, time-lag penyaluran kas dari pemerintah pusat yang sangat tidak merata: minim di awal tahun (hanya ratusan juta rupiah) dan menumpuk di Kuartal III mencapai Rp50–76 miliar pada Agustus–September. Pola ini menyulitkan pembiayaan proyek pembangunan di awal tahun anggaran dan memaksa dinas teknis menunda eksekusi program (Hidayat dkk., 2024; Sutaryo dkk., 2024).

Ketiga, hambatan birokrasi berupa lambatnya proses lelang dan pengadaan barang/jasa di awal tahun. Keterlambatan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berisiko memicu penalti penundaan transfer berikutnya dari Kemenkeu yang pada gilirannya mengganggu pembayaran belanja pegawai dan operasional seluruh kota.

3.3. Upaya Peningkatan Efektivitas DBH Minerba

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sejumlah strategi solutif. Dari sisi perencanaan, diterapkan penganggaran konservatif berbasis proyeksi harga komoditas dan penggunaan sistem SIPD untuk memangkas belanja non-produktif. Earmarking DBH ke program prioritas seperti RS Balikpapan Timur memastikan dana tidak dialihkan ke belanja pegawai atau operasional.

Dari sisi pelaksanaan, percepatan lelang melalui e-katalog lokal dilakukan untuk memotong rantai birokrasi pengadaan. Digitalisasi pemungutan pajak melalui TP2DD (e-tax online dan QRIS) menutup celah kebocoran sistem manual dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tim Asistensi internal dibentuk untuk mendampingi SKPD teknis agar terhindar dari keterlambatan SPJ anggaran modal.

Sebagai langkah antisipasi proyeksi pemotongan TKD 45,11% pada TA 2026, Pemkot Balikpapan mengambil kebijakan moratorium total pembangunan fisik gedung dinas baru, sehingga seluruh sumber daya difokuskan untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik esensial masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini membuktikan mekanisme indirect multiplier effect yang belum banyak dikaji dalam literatur DBH di Indonesia. Berbeda dengan temuan Teguh & Ichsan (2019) yang menyimpulkan daerah non-penghasil cenderung pasif memanfaatkan DBH, penelitian ini menemukan bahwa strategi investasi infrastruktur logistik menjadi kunci transformasi DBH menjadi kemandirian fiskal. Temuan ini memperkuat penelitian Hermawadi dkk. (2024) yang menegaskan kapasitas perencanaan anggaran yang adaptif adalah prasyarat efektivitas pengelolaan DBH. Sama halnya dengan temuan Adipura dkk. (2022), efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan PAD, di mana Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan PAD melampaui Rp1,06 triliun yang didorong oleh multiplier dari belanja modal strategis. Cheryll dkk. (2025) memperkuat temuan ini bahwa rasio kemandirian keuangan yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pengelolaan fiskal daerah secara keseluruhan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik yang ditemukan peneliti adalah keberadaan ribuan pekerja tambang transit sebagai katalis pertumbuhan sektor jasa di Kota Balikpapan. Pekerja tambang dari berbagai daerah di Kalimantan Timur yang memanfaatkan Balikpapan sebagai kota transit terbukti mendorong lonjakan Pajak PBJT Makanan/Minuman hingga Rp167,8 miliar dan Pajak Perhotelan Rp71,7 miliar. Fenomena ini menunjukkan bahwa posisi Balikpapan sebagai kota penyangga dan hub logistik IKN menghadirkan potensi fiskal tersembunyi (hidden fiscal potential) yang bersumber dari eksternalitas positif aktivitas pertambangan regional, bukan dari kepemilikan tambang itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa DBH Minerba terbukti sangat efektif meningkatkan pendapatan daerah Kota Balikpapan melalui mekanisme indirect multiplier effect, terefleksi dari PAD melampaui Rp1,06 triliun (2024), lonjakan retribusi 309,84%, dan validasi PMK 97/2025 kategori Kapasitas Fiskal Tinggi. Tiga hambatan utama yang dihadapi meliputi volatilitas harga komoditas dan perubahan formula DBH, time-lag penyaluran kas, serta kelambatan pengadaan. Sebagai respons, TAPD menerapkan penganggaran konservatif, earmarking DBH ke program prioritas, percepatan lelang melalui e-katalog lokal, digitalisasi pajak, dan transparansi fiskal berbasis PPID. Menghadapi proyeksi pemotongan TKD 45,11% pada APBN 2026, diversifikasi PAD ke sektor non-tambang dan penguatan UMKM ekonomi kreatif menjadi agenda fiskal strategis yang mendesak untuk dieksekusi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada cakupan lokus yang terbatas pada Kota Balikpapan saja, sehingga belum mencerminkan generalitas pola pengelolaan DBH Minerba di kota-kota hub logistik lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas kota hub logistik industri ekstraktif di Kalimantan dan Sumatera guna mengkonfirmasi apakah indirect multiplier effect DBH Minerba merupakan fenomena yang dapat direplikasi di daerah dengan karakteristik serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BPPRD, dan BAPPEDA Kota Balikpapan yang telah memberikan akses data dan wawancara mendalam. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Eko Budi Lestari, SE., MM selaku Dosen Pembimbing, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adipura, I. S., Rahayui, S., & Junaidi. (2022). The Effect of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Effectiveness and Efficiency on Economic Growth and Human Development Index as Intervening Variables. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 82–92. https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16267

Agustina, I. (2022). Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(1), 51–60. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i1.2787

Arief, M. Z. (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(9), 7175–7180. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32507

Cheryll, B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2025). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(4), 85–95. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(2), 158–172. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732

Hermawadi, A., Muryati, D., & Suryana, A. (2024). Local Government Development Policy: Natural Resource Revenue Sharing and Economic Growth in Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(15), 10375. https://doi.org/10.24294/jipd10375 [Scopus-indexed]

Hidayat, B. A., Supartoyo, Y. H., Setiawan, S., Ragimun, R., & Salim, Z. (2024). Government Infrastructure Investment Stimulation through Booming Natural Resources: Evidence from a Lower-Middle-Income Country. *PLOS ONE*, 19(5), e0301710. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301710 [Scopus-indexed]

Malini, H. (2021). Factors Affecting Capital Expenditures and Community Welfare in Kalimantan. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 8(2), 78–86. https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i2.4316

Malini, H., Seinna, Y. E., & Rustam. (2022). Indonesia's Foreign Debt Development and Macroeconomic Variables. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 11(2), 144–158. https://doi.org/10.26418/jebik.v11i2.52744

Malini, H. (2023). Analysis of Economic Growth in Several Districts in West Kalimantan. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(1), 57–70. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.3.1.57-70

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Value for Money dan Pengukuran Kinerja*. Yogyakarta: ANDI.

Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How Can Quality Regional Spending Reduce Poverty and Improve Human Development Index? *Journal of Asian Economics*, 82, 101515. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515 [Scopus-indexed]

Nasir, M. (2022). Protecting Forested Areas in Non-Forest Zone Through the Ecological Fiscal Transfer Scheme in Indonesia: A Case Study from Kutai Timur District. *Forest Policy and Economics*, 143, 102812. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102812 [Scopus-indexed]

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id

Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2822

Sunaryo, N. T., Agustinah, W., & Fatoni, A. (2024). Value for Money Financial Governance, Level of Investment, and Quality of Regional Development in Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(8), 3473. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.3473 [Scopus-indexed]

Sutaryo, S., Rusydi, M., & Hartono, U. (2024). Map to Prosperity: Natural Resource Revenue Sharing and Infrastructure Development in Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Development*, 8(11), 8405. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.8405 [Scopus-indexed]

Teguh, Y. M., & Ichsan, M. (2019). Kurang/Lebih Bayar Transfer Antar Pemerintah pada Sektor Mineral dan Batubara. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan (JPAK)*, 7(2), 65–82. https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.17022

Tumija, T., & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(2), 143–157. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528

Tumija, T., & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 9(2), 61–78. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2806

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. https://peraturan.bpk.go.id

Wati, L. N., Ispriyahadi, H., & Zakaria, D. H. (2022). The Flypaper Effect Phenomenon of Intergovernmental Transfers during the COVID-19: Evidence from Indonesia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci*, 40(2), 353–373. https://doi.org/10.18045/zbefri.2022.2.353 [Scopus-indexed]